

# **TRADISI ISLAM DAN PENDIDIKAN HUMANISME: Upaya Transinternalisasi Nilai Karakter Dan Multikultural Dalam Resolusi Konflik Sosial Masyarakat Di Indonesia**

**Irwan Ledang**  
UIN Sunan Kalijaga  
Irwan\_ledangi@yahoo.com

## **Abstrak**

Keragaman budaya, etnis, suku dan agama adalah kekayaan Indonesia. Keragaman ini merupakan potensi besar dalam pembangunan bangsa sekaligus menjadi potensi kerawanan konflik sosial. Setidaknya ada dua hal yang dapat dipakai dalam menengahi dan mencegah terjadinya konflik sosial di Indonesia. *Pertama*, Islam sendiri memiliki gagasan dan ajaran tentang humanisme, toleransi, dan menghargai perbedaan. Islam merupakan agama yang diturunkan sebagai *rahmatan lil alamin* bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. *Kedua* adalah peran pendidikan yang humanis. Pendidikan humanis menekankan pemanusiaan manusia. Pendidikan humanis memberi keseimbangan dalam kecerdasan intelektual, emosional, social, dan spiritual. Untuk mewujudkan konsep pendidikan yang humanis, diperlukan sikap transinternalisasi nilai multikultural dan nilai karakter dalam membentuk masyarakat dan generasi muda yang berahlak mulia dan menerima keragaman dari semua unsur. Keduanya diyakini dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis dan demokrasi sehingga mampu menutupi potensi konflik di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan humanistik, pendidikan karakter, resolusi konflik.

### **Abstract**

*The diversities in cultures, ethnicities, races, and religions are important Indonesian treasures. These constitute our national potentialities as well as a potential threat to social conflicts. There are at least two important things that can prevent the social conflict in Indonesia. First is Islam, a religion that brings a peace and mercy for all humankind. Second is the role of humanistic education that stressing on humanization of students. This kind of education offers a balance in term of intellectuality, emotion, social and spirituality for students. We need a kind of internalization process of multicultural and characters values to the students in order to build a humanistic educations. Both kind of educations will help the students to be respect to the diversities from the very beginning as well as to develop togetherness, tolerance, democratic, and humanistic behaviors. This will reduce any potentialities of the conflicts very much.*

**Keywords:** *Humanistic education, character building, conflict resolution.*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk baik dari aspek sosial, budaya, suku bangsa, ras, aliran, maupun agama. Oleh karenanya masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang *multicultural*. Kondisi seperti ini, sebagai bangsa, Indonesia dituntut untuk mampu merekonstruksi kebudayaan nasional yang dapat menjadi *perekat* atau *integrating force* terhadap keragaman dan heterogenitas kehidupan bersama terlebih dalam kehidupan beragama. Kesadaran tentang multikulturalisme sudah muncul sejak Negara Indonesia terbentuk dan digunakan oleh para pendiri bangsa untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia masa kini, konsep multikulturalisme seolah menjadi konsep baru dan asing. Hal ini dikarenakan kesadaran tentang konsep multikulturalisme yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini tidak terwujud pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan, persatuan dan stabilitas Negara yang kemudian muncul dalam *monokulturalisme* yang menjadi tekanan utama dan akhirnya semuanya memaksakan pola yang berkarakteristik penyeragaman dalam berbagai aspek sistem sosial, politik, dan budaya. Kenyataan seperti ini berakibat wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia

sangat rendah yang pada gilirannya memunculkan konflik antar etnis, dan konflik yang bersifat horizontal pada akar rumput.<sup>1</sup>

Konflik terjadi ketika dua atau lebih pihak menganggap bahwa kepentingan mereka tidak sesuai dengan kepentingan yang lain, mengungkapkan sikap bermusuhan atau mengejar kepentingan-kepentingan mereka dengan mengambil tindakan yang menyakiti pihak lain.<sup>2</sup> Pihak-pihak ini dapat berupa individu, kelompok kecil atau besar bahkan negara. Masalah konflik juga menjadi fenomena yang seakan menjadi biasa dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan kondisi Negara Indonesia yang serba multi dengan segala macam kemajemukan dan heterogenitas.<sup>3</sup> Untuk memahami konflik dalam konteks multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan yang mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan diantara berbagai *stake holder* yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Pendidikan merupakan sarana strategis mensosialisasikan dan memfungsikan konsep multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Islam dalam konteks *rahmatan lil 'alamin* mengayomi adanya kemajemukan dalam kehidupan alam dan manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan ketika membangun masyarakat Madinah juga dilandasi oleh kemajemukan suku, budaya, dan agama. Demikian pula halnya sejarah gerakan Islam yang dibawa oleh Wali Songo di Nusantara, khususnya di tanah Jawa sangat menghargai budaya lokal setiap masyarakat. Realitas ini menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan keseimbangan yang pantas antara gagasan tentang pertanggungjawaban pribadi dan realitas keberagaman. Menjadi

---

<sup>1</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 16.

<sup>2</sup> *Ibid...*, 18

<sup>3</sup> Dawam, Ainurrafiq *Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahisakarya Press, 2003), 77.

tanggung jawab setiap muslim untuk dengan tegas melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan sekaligus memberikan penghormatan terhadap keragaman.<sup>4</sup> Tradisi Islam ini tidak dapat terwujud jika tidak dapat diaktualisasikan lewat pendidikan yang humanis kepada masyarakat. Pendidik sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan, di era kemajemukan dan era multikultural akan selalu berhadapan dengan permasalahan bagaimana agar masing-masing tradisi keagamaan tetap dapat meneruskan, melanggengkan, melestarikan, mengalihgenerasikan, mempertahankan serta mewariskan kepercayaan dan tradisi yang diyakini sebagai suatu kebenaran, tetapi pada saat yang sama juga menyadari sepenuhnya keberadaan kelompok tradisi keagamaan lain yang juga berbuat serupa. Di titik inilah perlunya pengakuan akan keragaman, dan sikap ini penting ditumbuhkan pada peserta didik.

Pertanyaannya kemudian adalah, program pendidikan yang bagaimanakah yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersifat majemuk ini? Jawabannya tidak lain hanyalah mentransformasi dan menginternalisasi nilai multikultural dan pendidikan karakter lewat pendidikan yang humanis yang mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kemajemukan masyarakat dan budaya, serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Pendidikan humanis harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini dengan mengedepankan kebersamaan dalam pluralitas atas dasar prinsip-prinsip toleransi dan anti terhadap segala bentuk kekerasan. Sifat toleransi, hormat-menghormati, sopan santun, jujur, berlaku adil, dan tolong-menolong adalah cermin sifat dasar bangsa Indonesia yang majemuk, dan merupakan bentuk nilai-nilai karakter orang Indonesia yang mulai tereleminir dari proses pendidikan saat ini. Menafikan keberadaan tradisi-tradisi agama di muka bumi, baik di Barat apalagi di Timur, merupakan langkah yang salah arah. Masing-masing tradisi mempunyai hak hidup yang sama; masing-masing mempunyai cara untuk mempertahankan tradisi dan identitasnya sendiri-sendiri dengan berbagai cara yang biasa dilakukan.

---

<sup>4</sup> Haekal, Muhammad Husein, Hayat al Muhammad. Terjemahan Ali Auda, *SejarahHidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1990), 20.

Cara yang paling tepat adalah melalui jalur *pendidikan*, karena ia merupakan alat yang paling efektif untuk meneruskan, melanggengkan, melestarikan dan mempertahankan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari abad yang satu ke abad yang lain.

Dalam masyarakat ditemukan banyak individu atau kelompok yang berasal dari budaya berbeda, demikian pula dalam institusi pendidikan. Kenyataan tersebut tidak bisa dielakkan. Diversitas budaya itu bisa ditemukan di kalangan peserta didik maupun para guru yang terlibat secara langsung atau tidak dalam proses pendidikan. Diversitas itu juga bisa ditemukan melalui pengkayaan budaya-budaya lain yang ada dan berkembang dalam konstelasi budaya, lokal, nasional, dan global. Diversitas budaya ini akan mungkin tercapai dalam pendidikan jika pendidikan itu sendiri mengakui keragaman yang ada, bersikap terbuka dan memberi ruang kepada setiap perbedaan yang ada untuk terlibat dalam satu proses pendidikan.<sup>5</sup>Oleh karena itu, pendidikan yang humanis yang memiliki nilai karakter dan multikulturalisme harus dikembangkan di Indonesia sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan yang mengakar pada kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai agama. Masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Islam dan pendidikan humanis dalam meresolusi konflik sosial yang sangat rentan terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dengan akar budaya yang beraneka ragam. Namun, di sisi lain, keanekaragaman itu dapat menjadi nilai perekat dalam proses interaksi sosial jika dibangun di atas nilai-nilai agama yang universal serta proses pendidikan yang humanis berdasarkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia. Masalah ini akan dibahas dari aspek sosial historis Islam dan pendidikan yang memanusiakan manusia, terutama pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural dan karakterbangsa sebagai cerminan utama masyarakat Indonesia. Dari pijakan di atas, penulis merasa perlu mengkaji lebih mendalam terkait isu ini.

---

<sup>5</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural....*,47

## B. Pemicu Konflik

Dari aspek sosial budaya dan geografis, kemajemukan Indonesia dapat dibagi ke dalam dua dimensi besar. Pertama, kemajemukan vertikal yang tergambar dalam struktur masyarakat yang memiliki perbedaan lapisan dan strata sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah. Kedua, kemajemukan horisontal yang tergambar dari adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat dan kedaerahan (letak geografis). Realitas kemajemukan ini menjadi potensi besar bagi bangsa Indonesia sekaligus potensi konflik dalam kerawanan sosial sebab terjadinya pertentangan berbagai kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda rentan terjadi. Beberapa peristiwa konflik terjadi karena adanya pertentangan dengan membawa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sehingga dengan cepat menyebar menjadi konflik sosial yang menegangkan dan meresahkan. Konflik berbalut agama seringkali menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat yang majemuk.

Menurut kajian Badan Litbang Kementerian Agama RI disebutkan bahwa berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi pada awalnya bukan konflik agama, tetapi banyak faktor sosial lain yang sering terkait, kemudian agama dibawa sebagai faktor legitimasi sekaligus untuk menutupi akar konflik yang sebenarnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, kelompok agama menjadi rawan dengan hal-hal konfliktual. Berbagai peristiwa ketika terjadi penyerangan terhadap kelompok agama tertentu, orang-orang yang menyerang biasanya berargumentasi bahwa penyerangan itu mereka lakukan demi membela agama yang dianutnya.<sup>7</sup> Sensitivitas agama dalam masyarakat majemuk yang bisa menjadi faktor penyebab dan akar terjadinya konflik disebabkan hal-hal berikut. *Pertama*, adanya klaim kebenaran mutlak (*absolute truth claims*); klaim kebenaran mutlak harus ditujukan ke dalam diri sendiri atau interen penganut agama itu sendiri, bukan dipakai dalam menilai

---

<sup>6</sup> M. Atho Mudzhar, *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Depag, 2004) 13

<sup>7</sup> Sopamena Daniel, "Mendefinisikan Indonesia; Politik Identitas dalam Koridor Demokrasi Perspektif Komunitas Agama." *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional tanggal 26 Desember 2007, di Aula PPS UIN Alauddin Makassar. 3

agama lain. *Kedua*, adanya ketaatan buta (*blind abedience*), yaitu dengan mengesampingkan akal sehat dan sikap kritis dalam memahami ajaran agama. *Ketiga*, adanya tujuan akhir membenarkan apa pun dalam mencapai tujuan (*the end justifies the means*). Biasanya hal-hal ini rawan dikobarkan ketika menghadapi konflik antarpemeluk agama.<sup>8</sup>

Faktor-faktor ini menjadikan konflik-konflik sosial yang terjadi tampak lebih permanen dan sulit untuk diselesaikan karena menyimpan dendam yang mendalam, apalagi jika berpatokan bahwa mati dalam membela agama adalah perbuatan terpuji dan mati syahid. Hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama RI memandang bahwa akar masalah terjadinya konflik sosial di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga hal. (1) Adanya krisis di berbagai bidang yang terjadi beberapa tahun lalu. Selain menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintahan, birokrasi dan militer yang selama bertahun-tahun terlanjur memperlihatkan sikap yang kurang mendapat simpati sebagian masyarakat, juga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antarberbagai kelompok masyarakat. (2) Adanya perbedaan kepentingan, baik perseorangan maupun antarkelompok baik di bidang ekonomi, sosial, politik, ketertiban, dan keamanan. Kesenjangan ini mempermudah pengikut agama tersebut dalam arus persaingan, pertentangan, dan bahkan permusuhan antarkelompok.<sup>9</sup> (3) Akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula faham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusivitas dan sensitifitas kepentingan kelompok.

Apapun akar masalahnya, konflik sosial pada hakikatnya tetap merugikan semua pihak, terutama kalangan masyarakat bawah sehingga yang dibutuhkan adalah revitalisasi dan proses transformasi nilai dengan lebih mengedepankan hal-hal berikut. (1) Pemahaman fungsional agama dan perubahan pendekatan dari pendekatan misteri menjadi pendekatan yang rasional dan fungsional sehingga nuansa agama menyatu dengan kehidupan, termasuk di dalamnya transformasi

<sup>8</sup> Ahmad M Sewang, "Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama. Upaya Mengatasi Konflik Sosial", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, STAIN Datokarama Palu, tgl 20 Desember 2004.

<sup>9</sup> M. Atho. Mudzhar, *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, 14-15

nilai agama, penafsiran, dan reaktualisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat agar agama tetap dirasakan manfaatnya dan berfungsi dalam kehidupan. (2) Nilai-nilai luhur bangsa, kesadaran atas kemajemukan, dan perlunya sikap inklusif dalam beragama adalah nilai-nilai dasar yang harus dibangun secara sistematis lewat pencerdasan pendidikan dan pembelajaran yang humanis.

### **C. Islam dan Perdamaian**

Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*), dandengan fitrahnya setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan, dan memahami kebenaran, yang pada gilirannya akan mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran. Kemampuan dan kecenderungan inilah yang disebut sebagai sikap hanif. Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan prinsipnya bahwa setiap manusia adalah *homo-religios*. Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan sangat positif dan optimistic. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama yaitu Nabi Adam dan Hawa. Meskipun nenek moyangnya sama namun dalam perkembangannya kemudian terbagi menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaannya dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan yang ada selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu sama lain. Inilah yang kemudian oleh Islam dijadikan sebagai landasan “kesatuan umat manusia” yang pada gilirannya akan mendorong solidaritas antara kelompok-kelompok umat manusia.<sup>10</sup>

Konsep perdamaian dalam Islam sangat jelas dan tegas karena perkataan Islam itu sendiri secara etimologis berasal dari kata *aslama-yuslimu-islam* yang berarti ketundukan (*submission*), juga kedamaian atau perdamaian (*peace*) yang dapat bermakna ketundukan secara total kepada Tuhan serta perdamaian dengan sesama manusia dan juga rasa kedamaian dengan Tuhan.<sup>11</sup> Islam dalam terminologi ini bermakna

---

<sup>10</sup> Muhammad Tang, dkk, *Pendidikan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009) 70-71

<sup>11</sup> Agus Moh. Najib, 2011. “Hubungan Antar Agama” dalam *Merajut Perbedaan MembangunKebersamaan*, (Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN) 41-42

menghantarkan manusia kepada keselamatan dan kedamaian baik kepada Tuhan maupun sesama makhluk-Nya. Perdamaian juga dapat bermakna norma, sebuah nilai yang bersumber pada keesaan dan universalitas Tuhan, yaitu sebuah sistem nilai dan sebuah manifestasi dari keesaan Tuhan ke dalam kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>12</sup> Tuhan menurunkan Islam di muka bumi sebagai petunjuk yang mengarah pada kehendak Tuhan yaitu kedamaian di bumi dan bukan sekadar persoalan keyakinan terhadap kitab suci, tetapi merupakan persoalan implementasi terhadap titah suci dan realisasi perintah Tuhan.<sup>13</sup> Banyak ayat al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan memerintahkan manusia agar mengusahakan dan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat yang salah satunya dengan cara saling memahami dan menghargai dalam beribadah dan berkomunikasi. "Untukmu agamamu dan untukku agamaku" (Q.S.109:60). "Tidak ada paksaan dalam agama" (Q.S. 2:256). "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui" (Q.S.30:22). Universalitas nilai-nilai Islam tersebut mempertegas bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam perbedaan. Tuhan tidak menjadikan komunitas manusia dalam kondisi yang seragam melainkan Tuhan menjadikan manusia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, kultur, status sosial, dan lainnya.

Dengan kondisi yang beragam akan tercipta kehidupan yang inovatif, kreatif dan kompetitif. Allah berfirman: "Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menciptakan kalian satu umat saja. Tetapi, Allah hendak menguji kalian dengan pemberian Nya itu (yakni keragaman dan heterogenitas) kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan" (Q.S.5:48). Adanya pengakuan dalam Islam terhadap nabi-nabi dan agama-agama terdahulu sebelum Islam menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam meyakini dan menghargai perbedaan serta kemajemukan. Tuhan telah mengutus para nabi

<sup>12</sup>A. Maftuh. Abegebriel, *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*. (Yogyakarta: Sr-Ins Publishing, 2004) 401

<sup>13</sup> Baidowi, Ahmad, *Teologi Perdamaian, Landasan Islam tentang Masyarakat Tanpa Kekerasan*. (Yogyakarta: UIN Press, 2006) 126

terdahulu juga untuk kedamaian umat manusia. Kesamaan misi para nabi ini bisa dikatakan bahwa perdamaian merupakan sebuah kode etik universal. Artinya, umat Islam harus mampu hidup dalam masyarakat yang plural karena sesungguhnya kemajemukan merupakan rahmat Tuhan. Komitmen Islam tentang perbedaan dan kemajemukan telah mengajarkan manusia untuk mewujudkan perdamaian secara menyeluruh (Q.S.2:208). Konsep dasar al-Qur'an tentang perdamaian yang menjadi rujukan utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang damai dan toleran telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw ketika Islam berkuasa di Madinah dengan memperlakukan secara baik pemeluk agama lain meskipun Nabi ketika berada di Makkah sering mendapatkan perlakuan buruk dari kaum kafir Makkah. Bahkan, Nabi Muhammad saw membuat konstitusi sebagai aturan formal yang disebut Piagam Madinah yaitu sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw yang berisi suatu perjanjian formal antara dirinya dan semua suku dan pembesar Madinah pada tahun 622 Masehi dengan tujuan menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama.<sup>14</sup>

Kondisi sosial masyarakat Madinah yang pernah dipimpin Nabi Muhammad saw memiliki kesamaan pluralitas dengan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, adat istiadat, dan agama. Artinya, konsep dan formulasi ajaran Islam pada masa nabi yang damai dan toleran serta hidup dalam keharmonisan dalam keragaman budaya dan agama, harus pula bisa menjadi konsep ajaran Islam yang damai dan toleran di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, baik yang berlatar belakang politik, ekonomi suku maupun agama, yang kemudian mengatasnamakan Islam sesungguhnya bukan merupakan aktualisasi ajaran Islam. Islam adalah agama perdamaian dan anti terhadap segala bentuk kekerasan serta sangat menghargai perbedaan dan kemajemukan sosial masyarakat. Hanafi, mengemukakan adanya dua syarat untuk mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya. *Pertama*, manusia harus mampu menciptakan

---

<sup>14</sup> Agus Moh. Najib, "Hubungan Antar Agama" dalam *Merajut Perbedaan MembangunKebersamaan*. (Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN, 2011) 47

perdamaian internal yaitu perdamaian di dalam jiwa. Artinya, setiap orang harus menciptakan rasa aman dan rendah hati dengan tunduk kepada kitab suci. Perdamaian dalam jiwa ini akan menjadi manifestasi keimanan, kesalehan, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, kedermawanan, kesabaran, dan kesederhanaan. *Kedua*, dengan perdamaian jiwa ini akan tercipta perdamaian eksternal. Artinya, perdamaian bukan hanya bertujuan untuk meneguhkan kekuatan atau kekuasaan melainkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kesetaraan dan sebagainya. Kemiskinan, kesengsaraan, kelaparan, pengangguran, diskriminasi, eksploitasi, rasisme, *apartheid*, dan semacamnya merupakan sumber penghancur perdamaian. Oleh karenanya, jika ingin menciptakan sebuah perdamaian abadi, faktor-faktor pendukung penghancur perdamaian harus juga dieliminir, bahkan dihilangkan sama sekali. Nilai-nilai universalitas Islam telah memberi rujukan yang komprehensif terhadap makna konsep perdamaian yang penuh toleransi sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya yang kemudian melahirkan suatu model tatanan masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Sebagai manifestasi perdamaian dalam konteks Islam di Indonesia, selain perlunya penegasan kembali nilai-nilai universal Islam yang *rahmatan lil'alam*, juga perlu diperkuat instrumen regulasi yang mengatur hubungan antaragama karena di Indonesia urusan agama memiliki cakupan yang luas, bahkan meliputi semua sektor kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk bernegara sehingga kompetensi masing-masing perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi hubungan antarnegara dan agama maupun antar sesama agama dan umat beragama. Hubungan umat beragama yang sempat kelam di beberapa daerah di Indonesia dengan demikian dapat ditemukan solusinya demi terwujudnya kehidupan yang bermartabat, berbudaya dan damai. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita bersama untuk memikirkan upaya pemecahannya (*solution*). Termasuk pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Minimal, pendidikan harus mampu memberikan

penyadaran kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan, dan selayaknya pula, pendidikan mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara men-desain materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, mengormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural. Sudah selayaknya pendidikan berperan sebagai media transformasi sosial, budaya dan multikulturalisme.<sup>15</sup>

#### **D. Pendidikan Humanis dan Resolusi Konflik Sosial**

Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, kebijakan politik, serta formalisasi kurikulum dan bidang studi. Dalam semua variabel itu, hendaknya dipelihara lingkungan sekolah yang menghargai nilai-nilai multikultural. Setiap anak seyogianya harus beradaptasi diri dengan lingkungan sekolah yang multikultural. Salah satu penyebab utama kegagalan pendidikan nasional sebagai perekat kohesi sosial untuk menghasilkan generasi bangsa yang dapat hidup secara damai di negaranya sendiri adalah kekeliruan memilih paradigma pembangunan nasional masa lampau yang berpijak pada *unity in uniformity*.<sup>16</sup> Konsep pembangunan menekankan keseragaman dan persatuan dalam bentuk kesamaan pada seluruh sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Pembangunan diarahkan pada sistem sentralisasi, termasuk dalam pendidikan ditekankan pada penyeragaman besar-besaran mulai dari kurikulum materi dan buku-buku sumber belajar yang digunakan meskipun peserta didik memiliki latar belakang budaya, lingkungan social, dan alam yang bervariasi.

Setelah memasuki era reformasi, pembangunan dengan penyeragaman selama berpuluh-puluh tahun seperti terlepas dari suatu belunggu besar yang mengikat. Keanekaragaman dan kemajemukan budaya, adat istiadat, kehidupan sosial tiba-tiba menyeruak dan akibat dari euforia yang berlebihan itu berdampak adanya gesekan-gesekan

---

<sup>15</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 4-5

<sup>16</sup> Hafid, Abbas, *Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 65

sosial dan menjadi bibit yang melahirkan konflik sosial. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan pendidikan pada masa sekarang harus berpijak pada pluralisme kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendidikan harus diarahkan untuk menghargai potensi-potensi budaya lokal agar bisa tumbuh, dan kebhinekaan tetap berada dalam bingkai ke-Indonesiaan yang bersatu, tetapi tetap beragam; beragam namun dalam keutuhan.<sup>17</sup> Pengembangan pendidikan dengan memperhatikan potensi sosial budaya masyarakat adalah bentuk pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, bersifat demokratis, mengakui persamaan derajat manusia dalam keragaman yang berbeda.<sup>18</sup> Tidak boleh terjadi pada suatu komunitas yang sedang dilanda krisis kesejahteraan (konflik) seperti yang terjadi pada beberapa tempat dan daerah di Indonesia, misalnya, negara atau oknum aparat justru sibuk mencari celah-celah untuk menindas rakyat melalui kebijakan represif yang tidak populer, baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat atau mendehumanisasikan manusia Indonesia. Reformasi dan transformasi pendidikan dari pendidikan dan perilaku otoritatif kepada pendidikan yang humanis dengan mengakui karakteristik dan latar belakang sosial budaya peserta didik adalah bagian upaya mencapai cita-cita *education for all* secara adil dan berkelanjutan.

Pendidikan humanis menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan yaitu pengakuan terhadap hak dasar, keragaman dan potensi yang dimiliki serta didasarkan atas keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai positif dalam dirinya sebagai hasil interaksi sosial dan budaya. Riyanto menekankan pendidikan humanis adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antarpribadi dan antara pribadi dengan kelompok di dalam komunitas sekolah.<sup>19</sup> Pendidikan yang baik tidak sekedar mengasah kecerdasan intelektual semata tetapi juga menyelaraskan kecerdasan emosional, sosial dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*,...67

<sup>18</sup> Samsul, Muhammad Syaifudin dan Nizar, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010) 49

<sup>19</sup> Riyanto, Theo. *Pembelajaran sebagai Pembimbingan Pribadi*. (Jakarta: Grasindo, 2002) 10

spiritual sehingga memberi keseimbangan pada diri anak dari aspek individualitas kepada aspek sosial atau kepekaan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, Spranger menekankan bahwa manusia akan menjadi manusia yang sesungguhnya jika ia mengembangkan nilai-nilai rohani (nilai-nilai budaya) yang meliputi nilai pengetahuan, keagamaan, kesenian, ekonomi, kemasyarakatan dan politik.<sup>20</sup> Naluri dasar manusia sesungguhnya adalah setiap manusia ingin diperlakukan secara manusiawi. Keharusan itu diwujudkan dalam komitmen kepada budaya tanpa kekerasan dan budaya yang menghargai hidup, solidaritas dan tata cara ekonomi yang adil, toleransi dan hidup yang benar, serta budaya kesetaraan hak dan komitmen laki-laki dengan perempuan.<sup>21</sup> Menurut Barnadib, konsep dasar pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan nasional yang humanis, pendidikan yang mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki daya cipta, karsa dan karya dan mengembangkan semua daya secara seimbang tanpa menitikberatkan pada satu daya saja. Jika itu yang dilakukan, akan terbentuk manusia yang kurang humanis atau manusiawi.<sup>22</sup> Taman Siswa tidak memisahkan diri dengan masyarakat luas, ia harus menghubungkan diri dengan masyarakat di sekitarnya kalau ingin mengabdikan pada kepentingan masyarakat semurni-murninya. Filosofi dan tujuan dasar didirikannya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro adalah ingin mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa yang hidup dan mengakar dalam masyarakat. Artinya, pendidikan yang sesungguhnya dalam konsep awal pembangunan pendidikan nasional adalah (1) sebagai proses pewarisan, penerusan atau enkulturasi, dan sosialisasi perilaku sosial yang telah menjadi model panutan masyarakat lingkungannya secara baku; (2) sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan terciptanya situasi atau potensi-potensi dasar yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*,...20

<sup>21</sup> Ishak. Ngeljaratan, "Artikulasi Nilai Keadilan Melalui Sikap dan Perilaku Budaya", dalam Hamka Haq (ed) *Damai;Ajaran Semua Agama*. Makassar: Al-Ahkam, 2004

<sup>22</sup> Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1998) 38-39

dimiliki oleh anak yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka pada suatu zaman dan tempat mereka.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan di atas tampak bahwa kalangan tokoh-tokoh perintis dan peletak dasar pembangunan bangsa, khususnya pembangunan bidang pendidikan telah menempatkan muara pendidikan nasional yang akan dibangun selaras dengan filosofi dasar masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur, budaya, adat istiadat dan agama. Namun, dalam perkembangan selanjutnya nilai-nilai dasar pengembangan pendidikan itu mulai tereliminir akibat pengaruh budaya-budaya luar yang tidak searah dengan semangat nilai-nilai sosial budaya dan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, konsep dasar pendidikan nasional yang mengakar pada nilai sosial dan budaya sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia yang majemuk perlu dipertegas kembali sebagai solusi atas gesekan-gesekan sosial yang berpotensi melahirkan konflik dengan mengembangkan pendidikan multikultural dan pendidikan karakter bangsa.

### **E. Pendidikan Multikultural**

Multikulturalisme berkenaan dengan budaya, merujuk pada keragaman yang ada, dan berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normatif dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pendidikan, amat lah penting. Sebagai contoh, ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik/orang lain, baik dari aspek keragaman suku, ras, agama maupun budaya.<sup>24</sup> Pendidikan

<sup>23</sup> H.A.R, Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2005) 117

<sup>24</sup> A. Dardi Hasyim, dan Yudi Hartono, *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. (Surakarta: UNS-Press, 2009) 28

multikultural merupakan pendidikan yang menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku (*mode of action*) peserta didik terhadap keragaman agama, budaya dan masyarakat.<sup>25</sup> Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk memberikan persamaan hak di tengah keragaman masyarakat seperti hak berekspresi, menyatakan pendapat, berkelompok, dan hak-hak dalam sosial budaya, termasuk hak mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (*education for all*). Pendidikan multikultural menanamkan kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial.<sup>26</sup>

Konsep pendidikan multikultural menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua orang yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik yang diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Secara global, pendidikan multikultural telah direkomendasikan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui UNESCO pada tahun 1994 yang dinyatakan sebagai berikut. (1) Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerjasama dengan yang lain. (2) Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. (3) Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Arif, *Arti Penting Pendidikan Agama Islam yang Inklusif-Multikultural*. Yogyakarta: UIN-Press, 2010) 192

<sup>26</sup> Imron. Mushadi, *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009) 50

<sup>27</sup> W.I.M Poli, *Hubungan Antar Manusia dan Penanganan Konflik*. Makassar: Ahkam, 2004) 146-147

Dalam konteks Indonesia, gagasan multikultural muncul setelah rezim orde baru jatuh dan puncaknya ketika K.H Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi Presiden Republik Indonesia. Gus Dur secara nyata memberi ruang yang luas untuk mengakui semua hak-hak dasar dan sosial budaya rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk mengakui keberadaan budaya dan keyakinan masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Konsep multikultural kemudian diharapkan membantu mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan tetapi juga mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah mengembangkan sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran masing-masing agama.<sup>28</sup>

Konsep multikultural yang mengedepankan persamaan dan kesetaraan hak dalam perbedaan mendorong lembaga pendidikan untuk mengaplikasikan secara sistematis dan terencana dalam praktik pendidikan sebab dengan paradigma pendidikan multikultural akan mampu membangun kohesifitas, solidaritas dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama dan budaya. Artinya, nilai-nilai multikultural jika ditanamkan sejak dini kepada anak akan membantu mereka untuk mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Pemahaman nilai-nilai multikultural yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya gesekan-gesekan antarpribadi maupun antarkelompok sosial yang dapat mengarah pada konflik sosial. Dengan demikian, setiap orang akan menyadari bahwa manusia dilahirkan memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, suku, dan agama yang berbeda. Perbedaan adalah suatu keniscayaan dan merupakan *sunatullah*, hukum alam yang harus diterima setiap orang. Dengan demikian, akan muncul rasa penghargaan dan perlakuan antarsesama secara manusiawi, yaitu suatu model perlakuan dan interaksi yang selalu dipandang dari sisi dan nilai-nilai kemanusiaan

---

<sup>28</sup> M. Atho Mudzhar, *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*. (Jakarta: Puslitbang Depag, 2004) 18-19

(*humanismvalues*). Sebagaimana James Banks yang dikutip Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si dalam makalahnya yang berjudul "*Pendidikan Multikultural Dalam Pluralisme Bangsa*" menyebutkan bahwa, sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Bangs menjelaskan bahwa siswa harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Siswa juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing, mungkin saja interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandangnya. Siswa harus dibiasakan menerima perbedaan.

Beberapa tawaran pendekatan yang dapat dipakai dalam praktik pendidikan multikultural sebagai bentuk perwujudan pendidikan yang humanis antara lain sebagai berikut. (1) Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang berbeda secara kultural dilakukan dengan menitikberatkan pada terjadinya perubahan kultural yang damai. (2) Memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan dan mendorong peserta didik memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi, dan mau menerima orang lain. (3) Menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. (4) Pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antarkelompok. (5) Pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial.<sup>29</sup> Peran pendidikan multikultural akan menciptakan kesadaran pluralitas agama dan budaya dengan menumbuhkan perasaan berbagi dengan orang-orang yang secara fundamental berbeda orientasi ideologinya sehingga pendidikan multikultural diyakini

---

<sup>29</sup> Munib, Achmad, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Semarang: UNNES-Press, 2009) 30

dapat menjadi solusi bagi konflik dan terjadinya disharmoni di dalam masyarakat. Keharusan untuk berbagi itu membuat kita memikirkan kembali alat-alat kultural dan sosial agar mampu bertahan (*survive*) dengan perdamaian, kebebasan, dan martabat kemanusiaan. Manusia dilarang mengemas atau memperlakukan dirinya sebagai penyakit di masyarakat yang mengakibatkan adanya hak-hak sesame tak terpenuhi atau dilanggar.

## **F. Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja sama secara damai. Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, tanggung jawab pribadi, perasaan senasib, sepenenderitaan, pemecahan konflik secara damai, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam pendidikan karakter. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyiapkan generasi unggul yang sanggup bersaing dengan sumber daya manusia bangsa lain, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, budaya, dan moral agama.<sup>30</sup> Orang yang kehilangan karakter akan menjadi orang-orang yang tidak mempunyai harga diri dan tidak memiliki keberanian, kehilangan sifat dan sikap patriotisme, dan tidak sanggup menyampaikan kebenaran.<sup>31</sup> Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional berharap agar pendidikan dapat mengembangkan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, dan tubuh anak.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

---

<sup>30</sup> Bashori, Muchsin, at. All, *Pendidikan Islam Humanistik; Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010) 145

<sup>31</sup> Hasan, Muhammad Tolchah, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bangun Prakarya, 1996) 43

<sup>32</sup> Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan*, 90

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>33</sup> Rumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menggambarkan bahwa lima dari delapan potensi peserta didik yang harus dikembangkan dalam pendidikan sangat dekat dengan pembangunan karakter anak. Sebenarnya, nilai-nilai karakter yang hendak dibangun di atas sudah ada di dalam nilai-nilai Pancasila yakni nilai-nilai yang pada hakikatnya digali dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Oleh karena itu, menurut Tilaar pendidikan karakter Indonesia semestinya mengembangkan nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang mempersatukan Indonesia sehingga akan menjadi karakter yang khas bangsa Indonesia yang hidup dalam budaya multikultural.<sup>34</sup> Nilai-nilai pendidikan karakter yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai agama harus dibangun dan dimulai dari rumah tangga dan keluarga sebagai lembaga pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama, kemudian diteruskan dengan pendidikan di sekolah (pendidikan formal) dan di masyarakat (nonformal). Pendidikan karakter di sekolah penekanannya tidak hanya pada aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti luhur, dan sebagainya, baik dilakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.

Penanaman nilai-nilai di lingkungan masyarakat juga menjadi domain penting dalam pelaksanaan pendidikan karakter karena masyarakat memiliki peran penting dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanaman nilai-nilai etika dan estetika dalam membentuk karakter. Oleh karena itu, efektivitas pendidikan karakter akan terwujud jika ada sinergitas dan keterpaduan ketiga unsur di atas (keluarga, sekolah, dan masyarakat) dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Menurut Megawangi, setidaknya terdapat sembilan pilar sebagai bentuk nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan dan ditanamkan, yaitu: (a) cinta pada Tuhan dan kebenaran; (b) tanggung jawab; kedisiplinan dan kemandirian; (c) amanah; (d) hormat dan

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam) 37

<sup>34</sup> H.A.R, Manifesto Tilaar, *Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, 125

santun; (e) kasih sayang; kepedulian dan kerjasama; (f) percaya diri; kreatif dan pantang menyerah; (g) keadilan dan kepemimpinan; (h) baik dan rendah hati; dan (i) toleransi dan cinta damai.<sup>35</sup>

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sebagai berikut. (1) Desain berbasis kelas, berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan peserta didik sebagai pembelajar. (2) Desain berbasis kultural sekolah, yang berusaha membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai-nilai tertentu terbentuk dan terbatainkan dalam diri peserta didik. (3) Desain berbasis komunitas, artinya komunitas sekolah tidak berjuang sendiri, tetapi masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum dan negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka. Beberapa nilai dan konsep dasar pendidikan karakter yang dikemukakan di atas jika terimplementasi dengan baik akan melahirkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spritual. Wujud dari integrasi empat kecerdasan akan membentuk suatu pola sikap dan perilaku yang memiliki empati, arif, dan bijaksana serta bertanggung jawab, bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan.

Oleh karena itu, diyakini bahwa salah satu solusi nyata bagi konflik sosial dan disharmonisasi yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan mengembangkan pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter akan menumbuhkembangkan sikap empati, jujur, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan manusia lain sebagai sesama makhluk Tuhan yang memiliki kodrat dan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi berdasarkan harkat dan martabatnya secara manusiawi.

## **G. Kesimpulan**

Islam sangat menghargai perbedaan dan kemajemukan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, terkait maraknya konflik sosial

---

<sup>35</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. (Bandung: Mizan, 1999) 70

yang terjadi di Indonesia, umat Islam semestinya memiliki konsep dan resolusi yang jelas sebagai perwujudan Islam yang damai. Selama ini sebagian dari umat Islam memiliki pemahaman yang keliru terhadap pesan moral agama yang bersifat universal, yang pada gilirannya mengakibatkan timbulnya sikap *truth claim*, eksklusifisme, dan fanatisme yang berlebihan dan apologis. Dengan sikap demikian, ketika seorang individu berhadapan dengan individu lain di luar kelompoknya maka rentan terjadi gesekan bahkan konflik. Padahal secara sosial budaya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, multietnik dan multiagama. Pada titik ini lah arti penting pendidikan berwawasan multikulturalisme dikembangkan. Kehadiran agama harus dipahami sebagai rahmat bagi semua individu atau kelompok umat manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan, dari paradigma monokultural kepada paradigma multikultural serta dari model pendidikan sentralistik kepada pendidikan yang humanis. Pendidikan yang humanis adalah pendidikan yang mengembangkan keragaman dan toleransi serta pendidikan yang menumbuhkan kembangkan berbagai potensi dan karakter dasar manusia seperti kejujuran, keadilan, sopan santun baik yang bersumber dari nilai-nilai budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hafid. *Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abegebriel A. Maftuh. *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: Sr-Ins Publishing, 2004.
- Achmad, Munib. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang: UNNES-Press, 2009.
- Agus Moh Najib. "Hubungan Antar Agama" dalam *Merajut Perbedaan MembangunKebersamaan*, Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN, 2011.

- Arif, Muhammad. *Arti Penting Pendidikan Agama Islam yang Inklusif-Multikultural*, Yogyakarta: UIN-Press, 2010.
- Baidowi, Ahmad, *Teologi Perdamaian, Landasan Islam tentang Masyarakat Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: UIN Press, 2006.
- Barnadib Imam. *Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Bashori. Muchsin, at. All, *Pendidikan Islam Humanistik; Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Daniel, Sopamena. "Mendefinisikan Indonesia; Politik Identitas dalam Koridor Demokrasi Perspektif Komunitas Agama". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional tanggal 26 Desember 2007, di Aula PPS UIN Alauddin Makassar
- Departemen Agama RI. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam
- M Sewang, Ahmad. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama. Upaya ,Mengatasi Konflik Sosial", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional, STAIN Datokarama Palu, tgl 20 Desember, 2004.
- Manifesto, H.A.R, Tilaar. *Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2005.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mudzhar, M. Atho. *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Depag, 2004.
- Mudzhar, M. Atho. *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Depag, 2004.
- Muhammad Tolchah, Hasan. *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Bangun Prakarya, 1996.
- Mushadi, Imron. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009

- Ngeljaratan, Ishak. "Artikulasi Nilai Keadilan Melalui Sikap dan Perilaku Budaya", dalam Hamka Haq (ed) *Damai;Ajaran Semua Agama*. Makassar: Al-Ahkam, 2004.
- Poli, W.I.M. *Hubungan Antar Manusia dan Penanganan Konflik*. Makassar: Ahkam, 2004.
- Samsul, Muhammad Syaifudin dan Nizar, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010
- Theo, Riyanto. *Pembelajaran sebagai Pembimbingan Pribadi*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Tilaar, H.A.R, Manifesto. *Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*
- Yudi Hartono, dan Hasyim *Pendidikan Multikultural di Sekolah*, Surakarta: UNS-Press, 2009.